



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMZAH FANSURI
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
3. NHK : 514460

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.420.000.000**

1. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Bangunan Seluas 44 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
6. Tanah Seluas 893 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m2/31 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 775.670.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000



3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA/V Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

4. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 522.970.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 77.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 704.071.828

F. HARTA LAINNYA Rp. 163.435.812

Sub Total Rp. 8.140.377.640

III. HUTANG Rp. 2.815.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.325.377.640

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.